RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan ketentuan Pasal 346 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa perumusan rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, nomor 4 huruf d “Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD tahun 2025.

Sehubungan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto dimana dalam proses penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Jogoroto dilaksanakan untuk mengakomodir kegiatan-

kegiatan yang sudah dilaksanakan dan diformulasikan dalam Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan ulang dari seluruh program kegiatan tahunan Kecamatan Jogoroto, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.

Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada tataran clean goverment dan good governance.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jogoroto Tahun 2024, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025.

13. Pasal 9, ayat (2): Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

15. Point 2: Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);

22 Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

23. Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 23 April 2025 Nomor : 000.7.2/214/415.01/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut :

- ✓ Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Jogoroto.
- ✓ Menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan Kecamatan Jogoroto dengan Renstra Kecamatan, RKPD dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025- 2029;
- ✓ Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jogoroto dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang

mengalami penyesuaian anggaran agar tetap dapat terlaksana dan tidak mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Jogoroto adalah sebagai berikut:

- ✓ Sinkronisasi dan Optimalisasi pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2025-2029, khususnya untuk capaian target kinerja tahun 2025.
- ✓ Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- ✓ Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan renja OPD Kecamatan Jogoroto Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026, dengan Tujuan Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan mencapai Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan, 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jogoroto pada tahun 2025 melaksanakan 1 urusan pemerintahan unsur kewilayahan bidang urusan Kecamatan, yang dijabarkan dalam 6 Program, 12 kegiatan dan diimplementasikan dalam bentuk 25 Sub Kegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program dan kegiatan (*outcome*) dan sub kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jogoroto Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	**Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota**	• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD •

		• Administrasi Kepagawaian	• Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
		• Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	• Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	**Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	• Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	• Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	• Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	• Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

		Pengawasan Pemerintahan Desa	
5	**Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
6.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	• Penyelenggaraan Urusan Pemerinataha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	• Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2024
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2025				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja)	
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II (sesuai SPD)			
					K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)	K	Rp. (.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur Formulasi: Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd dibagi jumlah pegawai kali 100%**	100 persen	100 persen	100 persen	2.686.963.310,00	50 persen	1,269,865,105	100 persen	2.686.963.310,00
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	100 persen	100 persen	100 persen	4.921.500	100 persen	3.616.800	100 persen	4.921.500
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dok	2 dok	3 dok	3.659.000,00	2 dok	3.616.800	3 dok	3.659.000,00
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dok	5 dok	5 dok	1.262.500	5 dok	38.500	5 dok	1.262.500

	SKPD													
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengadaan pakaian dias pegawai**	100	persen	100	persen	0	persen	0	-	persen	-	0	persen	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	17	stel	17	stel	0	stel	0	-	stel	-	0	bulan	0
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu**	100	persen	100	persen	100	persen	2.503.118.462,00	50	persen	1.199.371.667	100	persen	2.265.857.341
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100	persen	100	persen	100	persen	163.150	100	persen	115.200	100	persen	163.150
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Jogoroto yang di fasilitasi	14	bulan	14	bulan	14	bulan	2.430.625.312	7	bulan	1.165.131.467	14	bulan	2.430.625.312
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1	dok	1	dok	1	dok	163.150	1	dok	115.200	1	dok	163.150
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	kali	12	kali	12	kali	72.330.000	6	kali	34.125.000	12	kali	72.330.000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	100	**persen**	**100**	**persen**	100	**persen**	62.753.300	50	**persen**	62.499.495	100	**Persen**	23.834.500
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	6	Paket	6	Paket	6	Paket	4.063.600	1	Paket	106.400	6	Paket	4.063.600

7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	4	jenis	4	jenis	4	jenis	13.044.100	2	jenis	2.638.300	4	jenis	13.044.100
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11	bulan	11	bulan	11	bulan	39.270.000	5	bulan	8.390.000	11	bulan	39.270.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	2	Paket	2	Paket	2	Paket	1.036.100	2	Paket	206.500	2	Paket	1.036.100
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1	Dok	1	Dok	1	Dok	2.352.000	1	Dok	720.000	1	Dok	2.352.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	dok	4	dok	4	dok	15.090.192	2	dok	6.053.000	4	dok	20.349.000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	100	persen	100	persen	100	persen	116.025.000	100	persen	11.765.930	100	persen	116.025.000
7.01.01. 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	-	gedung	-	gedung	1	gedung	116.025.000	1	gedung	11.765.930	1	gedung	11.765.930
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	8	unit	22	unit	8	unit	-	-	unit	-	-	unit	-
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	100	persen	100	persen	100	persen	55.896.000	50	persen	18.771.549	100	persen	55.896.000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12	bulan	24	bulan	12	bulan	17.460.000	6	bulan	6.832.196	12	bulan	17.460.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	38.436.000	6	jenis	11.939.353	12	jenis	38.436.000

7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	100	persen	200	persen	100	persen	38.734.655	50	persen	11.487.816	100	persen	38.734.655
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	9	unit	9	unit	9	unit	24.229.655	5	unit	9.474.916	9	unit	24.229.655
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya	9	unit	9	unit	9	unit	4.600.000	1	unit	130.100	9	unit	4.600.000
7 01 01 2.09 09	Pemelihraan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jogoroto yang dipelihara	4	gedung	2	gedung	2	gedung	14.290.800	1	gedung	-	2	gedung	14.290.800
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	8	unit	32	unit	8	unit	11.290.000	4	unit	2.360.000	8	unit	11.290.000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Paten Kecamatan**	85	nilai	83,83	nilai	84	nilai	8.574.850	88,33	nilai	N/A	85	nilai	8.574.850
7 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	100	persen	100	persen	100	persen	8.574.850	50	persen	1.662.500	100	persen	8.574.850
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	persen	100	persen	100	persen	8.574.850	50	persen	1.662.500	100	persen	1.662.500

7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	100	persen	100	persen	100	persen	6.787.500	50	persen	3.905.000	100	persen	6.787.500
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	persen	100	persen	100	persen	6.787.500	50	persen	3.905.000	100	persen	6.787.500
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeinahan Desa**	**Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa**	N/A	dokumen	48	dokumen	N/A	dokumen	6.787.500	50	persen	3.905.000	100	persen	6.787.500
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	laporan	48	laporan	N/A	laporan	6.787.500	50	persen	3.905.000	100	persen	6.787.500
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi**	N/A	persen	100	persen	100	persen	112.108.500	50	persen	87.110.000	100	persen	112.108.500
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	lembaga	52	lembaga	52	lembaga	112.108.500	50	persen	87.110.000	100	persen	112.108.500
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu**	N/A	dokumen	66	dokumen	66	dokumen	112.108.500	50	persen	87.110.000	100	persen	112.108.500
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	lembaga	66	lembaga	66	lembaga	112.108.500	33	lembaga	87.110.000	66	lembaga	112.108.500

7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	N/A	dokumen	66	dokumen	66	dokumen	112.108.500	22	dokumen	87.110.000	22	dokumen	N/A
		Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	11	BUMDes	22	BUMDes	11	BUMDes	112.108.500	11	BUMDes	87.110.000	11	BUMDes	
		Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	11	TP PKK	22	TP PKK	11	TP PKK		11	TP PKK		11	TP PKK	
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait**	100	persen	100	persen	N/A	persen	9.620.000	50	persen	5.070.000	100	persen	N/A
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum**	24	laporan	24	laporan	N/A	laporan	9.620.000	12	laporan	5.070.000	24	laporan	N/A
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	dokumen	24	dokumen	N/A	dokumen	9.620.000	12	dokumen	5.070.000	24	dokumen	N/A
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan**	N/A	persen	100	persen	100	persen	41.932.823	50	persen	41.932.823	100	persen	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	persen	100	persen	100	persen	10.500.000	50	persen	41.932.823	100	persen	

7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	laporan	2	laporan	N/A	lapo ran	9.937.500	2	laporan	10.500.000	2	laporan	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	dokumen	4	dokume n	N/A	doku men	48.000.000	2	dokumen		4	dokumen	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	N/A	keg	2	keg	2	keg	9.937.500	1	keg	10.500.000	2	keg	9.937.500
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam	N/A	laporan	4	laporan	N/A	lapo ran	48.000.000	2	laporan		4	laporan	48.000.000
									2.693.194.149			1.034.176.287 ,00			1.034.176.287, 00

Dilihat dari Tabel 2.2, Evaluasi Triwulan II Tahun 2024, dari 24 indikator sub kegiatan terdapat 7 (Tujuh) indikator sub kegiatan yang sudah mencapai target kinerja pada tahun berjalan, yaitu indikator:

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi
3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4. Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi
5. Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar
6. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina
7. Jumlah Laporan Trantibum

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum simetris dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen (Renja 2025 dan Renstra 2024-2029) dan 1 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III (Renja Perubahan 2025).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 dokumen terealisasi 2 dokumen (LkjIP 2023 dan TB I 2024, TB II 2024) dan 2 dokumen sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV).

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

   Pada sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 dokumen terealisasi 6 dokumen karena dokumen verifikasi per bulan, sehingga yang sudah dilaksanakan penatausahaannya 6 dokumen (Januari-Juni)

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

   Pada sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dengan target 4 laporan terealisasi 2 laporan (laporan perjalanan dinas)

- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

   Pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 24 laporan terealisasi 12 laporan (Januari sd. Juni meliputi listrik dan telepon)

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 25 laporan telah terpenuhi 12 laporan dengan rincian laporan penyediaan jasa administrasi 6 laporan dan laporan penyediaan premi asuransi 6 laporan.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

   Pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya dengan target 9 unit telah terealisasi 2 unit (1 unit pemeliharaan, 1 unit her STNK)

b. Pemelihraan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Pada sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 3 gedung belum terealisasi karena untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 8 unit terelealisasi 4 unit

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

   Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator :

   Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan telah terpenuhi 2 laporan, 2 laporan sisa akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target 12 laporan terealisasi 6 laporan (Januari sd. Juni) dan 6 sisanya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV (Juli sd. Desember 2022).

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   Pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan indikator umlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa telah terealisasi 11 laporan keuangan desa (laporan LRA tahun 2022) sisa 11 laporan adalah LPP Desa.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan telah terealisasi 6 laporan keuangan setiap bulan.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
   Pada sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa belum terealisasi karena belum ada kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan.
b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
   Pada sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah terealisasi 2 dokumen (setiap tribulan) dari target 4 dokumen

Analisis kinerja anggaran Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tribulan II adalah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

        Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 5.284.500,00 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 3.616.800 atau tercapai sebesar 73,49%.

     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

        Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 38.500 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 38.500 atau tercapai sebesar 100%.

   - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

     a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

        Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 2.430.625.312 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.165.131.467 atau tercapai sebesar 47,94%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 163.150 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 115.200 atau tercapai sebesar 70,61%.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 69.690.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 34.125.000 atau tercapai sebesar 47,18%.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 0 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 0 atau tercapai sebesar 00,00 %.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 4.063.600 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 1.075.800 atau tercapai sebesar 26,47%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 13.255.700 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 4.615.300 atau tercapai 27,30%

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 39.270.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 10.720.000 atau tercapai 27,30%.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 1.010.800 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 45.800 atau tercapai sebesar 4,53 % hal ini karena ada kesalahan rekening belanja.

b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 625.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 225.400 atau tercapai sebesar 36,06%.

c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 62.753.300 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 23.834.500 atau tercapai sebesar 37,98%

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 116.025.000 dan realisasi sebesar Rp. 103.589.185 per TW II atau sebesar 89,28%.

- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 17.460.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 8.219.060 atau tercapai sebesar 48,85%

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 38.436.000 dan realisasi sampai dengan

Tribulan II sebesar Rp. 17.624.189 atau tercapai sebesar 45,85%.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

   Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 38.734.655 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp 14.230.529 atau tercapai sebesar 36,74%. Kegiatan menyesuaikan Jatuh Tempo Pajak Kendaraan.

2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada tahun 2025 dianggarkan Rp. 14.290.800 belum terealisasi karena pemeliharaan gedung akan dilaksanakan pada tribulan III.

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 11.290.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 2.960.000 atau tercapai sebesar 10,96 %.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

a. Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan efektivitas kegiatan Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 3.315.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 551.500 atau tercapai sebesar 16,64%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 112.108.500 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 21.146.000 atau tercapai sebesar 24,28%%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 9.620.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 5.070.000 atau tercapai sebesar 52,70%

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 6.787.500 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 3.905.000 atau tercapai sebesar 57,53%.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- **Fasilitasi, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Tahun 2025 dianggarkan Rp. 41.932.823 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 2.975.000 atau tercapai sebesar 7,09%.

b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada Tahun 2024 dianggarkan Rp. 24.000.000 dan realisasi sampai dengan Tribulan II sebesar Rp. 10.500.000 atau tercapai sebesar 43,75%%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Jogoroto merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Jogoroto, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Jogoroto adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jogoroto menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Kewilayahan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program

   Sampai dengan periode tribulan II tahun 2025, Kecamatan Jogoroto telah menganggarkan penyusunan rencana kerja sejumlah 2 dokumen (Renja 2025 dan Perubahan Renstra 2025-2029) , laporan capaian kinerja sebanyak 3 dokumen (LkjIP 2024 dan laporan

capaian kinerja tribulan 1 dan 2), dan laporan keuangan sebanyak 1 dokumen (Laporan Keuangan 2024).

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

   Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kecamatan yaitu terselenggaranya Musrenbang kecamatan, terlaksananya kegiatan pelayanan PATEN, dilaksanakannya kegiatan pembinaan administrasi desa oleh Tim Pembina Kecamatan, pembinaan PKK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Jogoroto menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Evaluasi capaian kinerja pelayanan disajikan dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	SPM/NSPK/ SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai SAKIP			70,01	72,09	73,00	74,00	70,89	72,09	73,00	74,00	
3	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase realisasi pengadaan gedung kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	SPM/NSPK/ SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
11	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	1. Nilai IKM Kecamatan Jogoroto			83,46	85,00	85,00	86,00	83,46	85,00	96,00	97,00	
14	2.Nilai IPP Kecamatan Jogoroto			3,00	3,5	4,00	5,00	3,00	3,5	3,30	4,5	
15	Nilai Paten Kecamatan			85,00	85,00	86,33	87,00	85,00	85,00	86,00	87,00	
16	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	2. Jumlah Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif			22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	
19	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu			22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	22 Desa	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output	SPM/NSPK/ SDG's	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
20	2. Jumlah Lembaga . /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	22 Lembaga	
21	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
22	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum.			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
27	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
28	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
29	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

   Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Jogoroto dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Jogoroto, dapat diuraikan sebagai berikut:

   a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

   Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Jogoroto adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

   b. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

   Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes

   c. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

   Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang
   dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

   d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

e. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Jogoroto karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah “Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembanguanan daerah adalah:
   a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RKPD Kab. Jombang Tahun 2025-2029
   b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
   c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Jogoroto belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2025 yakni mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi proses layanan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkatlunak maupun perangkat keras sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;

b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;

c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

d. Perubahan KTP SIAK menjadi KTP-el di Kecamatan Jogoroto saat ini

e. belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman KTP-el terkadang tidak dapat dioperasionalkan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;

f. Pemohon KK dan KTP-el di wilayah Kecamatan Jogoroto cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

g. Penerapan Aplikasi CAK NGATESO (Cetak Akta Teko Deso) , yaitu pelayanan perubahan KK, Pencetakan Akte Kelahiran dan Akte Kematian dari Desa mengalamikendala berupa : jaringan VPN yang belum stabil, dan kemampuan SDM perangkat desa pada 2 desa yang masih kurang.

h. Pada saat Aktivasi Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) pada warga, masih belom mengetahui tentang manfaat aplikasi tsb, dan sepsifikasi perangkat yang masih kurang dari standar minimal.

5. Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;

b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;

c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Jogoroto terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

6. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

a. Perencanaan Pembangunan

- Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kabupaten Jombang.
- Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan perubahan rencana strategis tahun 2024-2025 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.

- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Setiap tahun OPD Kecamatan Jogoroto dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Jogoroto dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerjaperlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tribulan II, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Jogoroto melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 program Kecamatan

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

Sejauh ini tingkat kinerja Kecamatan Jogoroto sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana yang telah ditargetkan dapat direalisasikan dengan baik.

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat

dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Jogoroto sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Jogoroto didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jogoroto dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang berkaitan dengan :

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renstra.

b. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program di seluruh Desa.
c. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting* data,
d. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya.

Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Jogoroto sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum SKPD dan berpedoman pada Perubahan RKPD Kab. Jombang Tahun 2023, maka ditetapkan Perubahan Renja Kecamatan Jogoroto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN JOGOROTO
TAHUN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7.01.01	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota**	**Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur**	**100%**	**2.820.029.717,00**
7.01.01.2.01	**1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**6.484.500,00**

7.01.01.2.01.01	**Sub Kegiatan :** 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	**3.659.000,00**
7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporam	1.262.500,00
7.01.01.2.02	**2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan**	**100%**	**2.503.118.462,00**
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	
7.01.01.2.02.01	**Sub Kegiatan :** 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.430.625.312,00
7.01.01.2.02.03	2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	**68.250.000,00**
7.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	249.950,00
7.01.01.2.05	**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto**	**100 %**	**0**
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelelngkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Stel	0
7.01.01.2.06	**3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**74.855.992,00**
7.01.01.2.06.01	**Sub Kegiatan :** 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 paket	9.192.100,00
7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.557.500,00

7.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	1.036.100,00
7.01.01.2.06.05	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	**2.156.000,00**
7.01.01.2.06.06	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	11.115.750,00
7.01.01.2.06.09	6. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2.871.200,00
7.01.01.2.08	**4.Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**93.972.363,00**
7.01.01,2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**1 Unit**	**116.025.000,00**
7.01.01.2.08.02	**Sub Kegiatan** : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0
7.01.01.2.07	**5.Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**55.896.000,00**
7.01.01.2.07.09	**Sub Kegiatan:** 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	46.843.785,00
7.01.01.2.07.10	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	36.264.000,00
7.01.01.2.09	**6. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik.**	**100%**	**64.315.455,00**
7.01.01.2.09.02	**Sub Kegiatan:** 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	32.710.720,00

7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	14.290.800,00
7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	7.920.000,00
7.01.02	**Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Nilai PATEN Kecamatan**	**81,00**	**3.315.000,00**
7.01.02.2.02	**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar**	**100%**	**3.315.000,00**
7.01.02.2.02.03	**Sub Kegiatan :** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	3.315.000,00
7.01.05	**Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan**	**100%**	**108.064.523,00**
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	**100%**	
7.01.05.2.01	**Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA**	**4 laporan**	**53.648.523,00**
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	**4 dokumen**	**48.000.000,00**
7.01.05.2.01.03	**Sub Kegiatan** : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	53.648.523,00
7.01.05.2.01.08	**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	53.648.523,00
7.01.03	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif**	**100%**	**125.148.500,00**

7.01.03.2.01	**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina**	**22 lembaga**	**125.148.500,00**
		Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	**11 Desa**	
7.01.03.2.01.03	**Sub Kegiatan** : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	87.110.000,00
7.01.03.2.01.01	**Sub Kegiatan** : 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	22 lembaga	24.998.500,00
7.01.04	**Program : Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait**	**100%**	**9.620.000,00**
7.01.04.2.02	**Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan**	**12 kegiatan**	**9.620.000,00**
7.01.04.2.02.01	**Sub Kegiatan :** Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	9.620.000,00
7.01.06	**Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa**	**100%**	**6.787.500,00**
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	**100%**	

7.01.06.2.01	**Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa**	**28 dokumen**	**6.787.500,00**
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 dokumen	6.787.500,00
				3.053.509.240,00

BAB III
PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan RKPD juga harus memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur serta Visi Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastuktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, mahu dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan

nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan

Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

RKPD Tahun 2025 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2025 yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan.
4. Penguatan daya saing

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Kebijakan pembangunan pada skala regional yang direncanakan oleh Provinsi Jawa Timur sebagaimana RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, mengambil tema "Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agrobisnis.".

Untuk mewujudkan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Pendidikan Berkualitas
2. Peningkatan layanan Kesehatan
3. Percepatan penurunan kemiskinan
4. Penurunan stunting dan penyakit lainnya
5. Percepatan pembangunan infrastruktur
6. Pengendalian inflasi
7. Peningkatan investasi
8. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam
9. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, damai dan bermartabat.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang, dan Kecamatan Jogoroto melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Kewilayahan, maka program kegiatan di Kecamatan Jogoroto mendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang ke-1, yakni: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik dengan indikator Indeks Good Governance (IGG) dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.**

Guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jogoroto adalah : **"Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi"** dengan indikator **1. Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan, 2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Maka Sasaran Kinerja Kecamatan Jogoroto **adalah "1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan " dan "2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik" dengan indikator sasaran : 1) Nilai Evaluasi AKIP Kec. Jogoroto,**

Perhitungan Sasaran menggunakan formulasi tersebut adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Renstra Kecamatan Jogoroto Tahun 2024-2026

TUJUAN			SASARAN			ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI			
Meningka tnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	65	Meningkatn ya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima 2. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat	1. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dibidang IPTEK dan IMTAQ 2. Optimalisasi Penyajian data dan informasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	65	Meningkatny a Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jogoroto	IKM Kecamatan Jogoroto tahun n	Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				IPP Kecamatan Jogoroto	IPP Kecamatan Jogoroto tahun n	Meningkatkan kegiatan	Pengembangan	Program: Penyelenggaraan

						seni,budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kegiatan seni, budaya,dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan	Urusan Pemerintahan Umum
				Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait ----------x 100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kecamatan 2. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat	Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu ----------x 100% Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes	Pengembangan produk Lokal masyarakat Sesuai potensi Kecamatan	Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan	Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes tepat waktu	Optimalisasi partisipasi Masyarakat dalam Proses perencanaan	Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

				APBDesa tepat waktu	----------x 100% Jumlah evaluasi Raperdes APBDes / Perubahan APBDes	dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan		

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Secara umum tidak terdapat perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2023, akan tetapi sebagai bagian dari upaya Kecamatan Jogoroto dalam mencapai target kinerja jangka menengah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang berbasis agribisnis, serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II dilaksanakan perubahan sub kegiatan, indikator dan target pada beberapa sub kegiatan.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025, adalah:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/Berkurang		Catatan
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	18	19	20
						Kecamatan Jogoroto				2.954.393.633,00	3.092.410.932,00	3.053.509.240,00		-99115607	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.954.393.633,00	3.092.410.932,00	3.053.509.240,00		-99115607	
	7	01				KECAMATAN				2.954.393.633,00	3.092.410.932,00	3.053.509.240,00		-99115607	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	100 Persen	2.686.963.310,00	2.830.895.409,00	2.820.029.717,00		-133066407	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	100 Persen	5.284.500,00	6.484.500,00	6.484.500,00		-1200000	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.459.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00		-1200000	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.825.500,00	2.825.500,00	1.262.500,00		1563000	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencaiaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	100 Persen	2.363.661.013,00	2.503.118.462,00	2.503.118.462,00		-139457449	

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.292.607.863,00	2.430.625.312,00	2.430.625.312,00		-138017449	
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	70.890.000,00	72.330.000,00	68.250.000,00		2640000	
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	163.150,00	163.150,00	249.950,00		-86800	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jogoroto	100 Persen	100 Persen	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00		0	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00		10200000	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	74.532.142,00	74.855.992,00	74.855.992,00		-323850	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.063.600,00	4.063.600,00	2.871.200,00		1192400	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	13.302.250,00	13.044.100,00	9.192.100,00		4110150	

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.580.000,00	39.270.000,00	35.557.500,00		6022500	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.036.100,00	1.036.100,00	1.036.100,00		0	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.352.000,00	2.352.000,00	2.156.000,00		196000	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.198.192,00	15.090.192,00	11.115.750,00		1082442	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	undefined undefined	100 Persen	116.025.000,00	116.025.000,00	116.025.000,00		0	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	116.025.000,00	116.025.000,00	116.025.000,00		0	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	55.260.000,00	55.896.000,00	55.896.000,00		-636000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.900.000,00	17.460.000,00	46.843.785,00		-27943785	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.360.000,00	38.436.000,00	36.264.000,00		96000	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	62.000.655,00	64.315.455,00	64.315.455,00		-2314800	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	38.734.655,00	38.734.655,00	32.710.720,00		6023935	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	11.976.000,00	14.290.800,00	14.290.800,00		-2314800	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	11.290.000,00	11.290.000,00	7.920.000,00		3370000	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	86 Nilai	86 Nilai	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00		0	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00		0	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	3.315.000,00	3.315.000,00	3.315.000,00		0	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	"Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100 Persen	100 Persen	128.748.500,00	125.148.500,00	112.108.500,00		16640000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	11 Desa 22 Lembaga	11 Desa 22 Lembaga	128.748.500,00	125.148.500,00	125.148.500,00		3600000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	29.948.500,00	28.748.500,00	24.998.500,00		4950000	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	98.800.000,00	96.400.000,00	87.110.000,00		11690000	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 Persen	100 Persen	15.050.000,00	15.050.000,00	9.620.000,00		5430000	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 Persen 4 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen	15.050.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00		0	

	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	15.050.000,00	15.050.000,00	9.620.000,00		5430000	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 4 orang Dokumen	4 100 Dokumen orang	110.379.323,00	108.064.523,00	101.648.523,00		8730800	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi Forkopimcam Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100 Persen 4 Dokumen	100 Persen 4 Dokumen	110.379.323,00	108.064.523,00	108.064.523,00		2314800	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	62.379.323,00	60.064.523,00	53.648.523,00		8730800	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00		0	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pertanggungjawban Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	9.937.500,00	9.937.500,00	6.787.500,00		3150000	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dengan lengkap	11 Desa	11 Desa	9.937.500,00	9.937.500,00	9.937.500,00		0	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	22 Dokumen	9.937.500,00	9.937.500,00	6.787.500,00		3150000	
	J U M L A H									**2.954.393.633,00**	**3.092.410.932,00**	**3.053.509.240,00**		**2.779.660.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kecamatan Jogoroto Tahun anggaran 2025, maka diharapkan dapat terwujud suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan kinerja aparatur serta Pembangunan, khususnya pada kantor Kecamatan Jogoroto dalam kurun waktu tahun 2025 khususnya pada tribulan III dan IV.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata dititik beratkan pada perencanaan yang strategis saja, namun perlu didukung dengan peningkatan kinerja aparatur. Untuk mewujudkan itu,maka semua komponen dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan Kecamatan Jogoroto melalui Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan prima sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perlu pula ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta Desa dalam wilayah kecamatan Jogoroto, sehingga makin memantapkan apa yang telah dicapai sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jogoroto Tahun anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan, dengan harapan terwujudlah suatu kegiatan pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya masukan-masukan, koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Jogoroto, Juni 2025

CAMAT JOGOROTO

NUNIK HIDAYATI, ST
Pembina Tk I
NIP. 196908141997032003